Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

ANALISIS PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Mohamat Rezhah Mamonto,[1)] Dafyar Eliadi Hardian,[2)] Teuku Fajar Shadiq[3)]

Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana,
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

2407010030@students.unis.ac.id[1)]
Dafyar711@unis.ac.id[2)]
tfshadiq@unis.ac.id[3)]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan website pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan partisipasi publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan kunci serta konten digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan website telah berjalan cukup baik dalam menyediakan informasi berkala dan regulasi, namun masih menghadapi kendala kesenjangan infrastruktur jaringan internet di pedesaan serta rendahnya literasi digital masyarakat. Dampak terhadap partisipasi publik masih bersifat tahap awal interaksi dan pelengkap sarana konvensional. Disarankan agar Pemerintah Daerah meningkatkan pemerataan akses infrastruktur digital, melaksanakan sosialisasi intensif mengenai fitur partisipasi publik, serta mengoptimalkan pelatihan kapasitas bagi sumber daya manusia pengelola konten agar informasi yang disajikan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: aksesibilitas; akuntabilitas; e-government; keterbukaan informasi; transpar

ABSTRACT

This study aims to analyze the utilization of government websites in realizing transparency, accountability, accessibility, and public participation in East Bolaang Mongondow Regency, specifically at the Department of Communication and Informatics. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation studies of key informants and digital content. The results indicate that the utilization of the website has proceeded fairly well in providing periodic information and regulations, yet still faces obstacles due to internet network infrastructure gaps in rural areas and low public digital literacy. The impact on public participation remains at the initial interaction stage and serves as a complement to conventional means. It is recommended that the Regional Government improve the distribution of digital infrastructure, conduct intensive socialization regarding public participation features, and optimize capacity training for human resources managing the content to ensure the information presented is more inclusive and sustainable.

Keywords: *accessibility; accountability; e-government; information disclosure*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang terletak di bagian tenggara Provinsi Sulawesi Utara, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang beragam dan kaya akan potensi alam. Secara astronomis, wilayah ini berada antara 0° 25’ 05” hingga 0° 57’ 40” Lintang Utara dan 124° 19’ 15” hingga 124° 51’ 14” Bujur

Timur. Dengan luas sekitar 910,18 km², Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki bentang alam yang mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan yang hijau dan subur. Topografi wilayah ini sangat bervariasi, di mana pada bagian pesisir, terutama yang menghadap ke Teluk Tomini, terdapat garis pantai yang panjang dan potensi kelautan yang signifikan, sementara bagian tengah dan utara didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang menjadi sumber mata air dan kawasan hutan tropis. Keanekaragaman ini menjadikan daerah tersebut memiliki prospek tinggi untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam. Iklim di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk dalam kategori iklim tropis basah, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20°C hingga 30°C. Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun mendukung pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, serta menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air. Secara administratif, pusat pemerintahan terletak di Tutuyan, yang berada di kawasan pesisir dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kondisi geografis yang strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki peluang besar untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di era digital yang dinamis ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara luas. Salah satu implementasi konkret dari digitalisasi pemerintahan adalah penggunaan website resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi kepada publik secara terbuka dan real-time. Website pemerintah memiliki potensi strategis, khususnya di tingkat lokal, sebagai media publikasi informasi seperti anggaran, program pembangunan, laporan kegiatan, hingga layanan administrasi. Hal ini diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat secara memadai. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mulai menerapkan digitalisasi pelayanan informasi publik melalui website resmi pemerintahan daerah.

Berdasarkan data statistik yang dihimpun, jumlah kunjungan ke website pemerintah daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tercatat jumlah pengunjung pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.140 pengunjung, kemudian mengalami penurunan menjadi 5.023 pengunjung pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 6.077 pengunjung pada tahun 2024. Fluktuasi jumlah kunjungan dan efektivitas pemanfaatan website tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor laten, seperti tingkat literasi digital masyarakat yang masih bervariasi, kurangnya intensitas pembaruan konten secara menyeluruh, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta infrastruktur teknologi yang belum merata ke seluruh pelosok. Berdasarkan data Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66 persen, mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2024 yang sebesar 79,50 persen dan tahun 2023 yang sebesar 78,19 persen. Kendati demikian, kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah timur Indonesia dan wilayah pedesaan yang memiliki hambatan geografis seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kesenjangan riset yang diidentifikasi dalam kajian ini memberikan justifikasi kuat atas urgensi pelaksanaan penelitian. Pertama, masih minimnya kajian empiris di tingkat kabupaten terpencil yang secara langsung meneliti dampak pemanfaatan website terhadap keterbukaan informasi. Kedua, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kualitas dan relevansi informasi yang disajikan melalui platform digital pemerintah. Ketiga, analisis mendalam mengenai pengaruh faktor lokal seperti jaringan internet yang belum merata dan karakteristik sosial budaya masyarakat masih sangat terbatas. Keempat, studi mengenai tingkat literasi digital masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan kanal e-government di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika belum dieksplorasi secara memadai. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama, yaitu bagaimana pemanfaatan website pemerintah dalam mewujudkan transparansi informasi publik, bagaimana pemanfaatan website pemerintah sebagai sarana akuntabilitas kepada masyarakat, bagaimana tingkat aksesibilitas dan kemudahan penggunaan website, serta bagaimana pemanfaatan website dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Secara teoritis, penelitian ini ditopang oleh beberapa teori administrasi publik dan e-government yang melebur secara deskriptif. Teori administrasi publik menekankan pengelolaan organisasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warganya, di mana paradigma New Public Service dari Denhardt dan Denhardt menyatakan bahwa pemerintah bertugas melayani warga negara secara terbuka dan inklusif. Teori e-government menurut Indrajit dan model tahapan perkembangan dari Layne dan Lee memberikan kerangka mengenai bagaimana pemanfaatan internet dapat mengintegrasikan informasi dan layanan publik secara katalog daring dan transaksional. Selain itu, kajian ini memanfaatkan Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis untuk mengukur penerimaan teknologi melalui konstruk manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Teori partisipasi publik dari Arnstein juga diintegrasikan untuk menganalisis sejauh mana keterbukaan akses informasi mampu meningkatkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan seperti Musrenbang hingga pengawasan pelayanan publik melalui media digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena pemanfaatan website pemerintah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Desain deskriptif kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggambarkan realitas aktual di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Sumber data atau informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang memiliki kompetensi, otoritas, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan penelitian terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai Informan Utama satu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Informan Kunci satu, Pranata Humas sebagai Informan Kunci dua, serta tiga orang warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bertindak sebagai Informan Tambahan.

Bahan penelitian dan pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang mengalir secara deskriptif tanpa adanya poin-poin yaitu wawancara mendalam,

observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan menggunakan panduan semi-terstruktur terhadap para pejabat pengelola dan warga masyarakat guna menggali persepsi, pengalaman, serta kendala pemanfaatan website. Observasi dilakukan dengan menelaah langsung fungsionalitas, struktur menu, keterkinian konten, dan responsivitas tampilan website resmi pemerintah daerah. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa rencana strategis dinas, notulen rapat koordinasi, laporan realisasi anggaran, dokumen evaluasi layanan informasi publik, serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan simultan yaitu reduksi data untuk menyaring dan mengkategorikan data lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode guna menjamin validitas serta keabsahan data ilmiah yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Website Pemerintah dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik melalui website resmi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi disajikan secara terbuka, lengkap, dan berkala sesuai dengan amanat regulasi nasional. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyediakan media publikasi digital, walaupun dalam tataran praktisnya masih dihadapkan pada beberapa keterbatasan yang cukup signifikan. Pihak pemerintah daerah menerangkan bahwa website resmi telah dijadikan kanal utama penyampaian informasi yang bersifat wajib diumumkan secara berkala seperti program kerja pembangunan dan maklumat pelayanan publik lainnya. Hal ini didukung oleh upaya pembaruan konten yang terjadwal minimal dua hingga tiga kali dalam seminggu, khususnya saat terdapat agenda kedinasan yang krusial atau pengumuman resmi yang mendesak untuk diketahui khalayak luas.

Kendati dari sisi internal birokrasi telah terdapat Standard Operating Procedure yang jelas mengenai pengelolaan konten dan pembaruan berkala, realitas yang dirasakan oleh warga masyarakat memperlihatkan adanya variasi pemahaman. Warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pusat pemerintahan mengekspresikan bahwa informasi dasar seperti pengumuman rekrutmen pegawai, lowongan kerja lokal, dan bantuan sosial sudah terdokumentasi dengan cukup jelas dan transparan pada website. Namun, bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok pedesaan, transparansi digital tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan secara memadai karena mereka masih sangat bergantung pada saluran penyampaian informasi tradisional yang bersifat lisan atau melalui pengumuman di kantor desa setempat. Keterbatasan sosialisasi digital ini berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak atas informasi secara menyeluruh.

Pemanfaatan Website Pemerintah sebagai Sarana Akuntabilitas kepada Masyarakat

Prinsip akuntabilitas mengarusutamakan kewajiban lembaga pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk kebijakan, program kerja, dan pemanfaatan anggaran keuangan publik kepada masyarakat secara jujur dan objektif.

Pemanfaatan website pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah diarahkan untuk menjadi sarana akuntabilitas publik tersebut, di mana dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Strategis dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diunggah ke dalam sistem katalog daring agar dapat dipantau oleh siapa saja yang berkepentingan. Penanggung jawab teknis humas menegaskan bahwa seluruh data yang dipublikasikan tidak melalui proses sensor yang melanggar hak publik, melainkan disajikan apa adanya guna mempertahankan validitas informasi kedinasan.

Meskipun dokumen administratif kedinasan telah disediakan secara memadai, masyarakat pengguna website memberikan catatan kritis bahwa dokumen terkait realisasi fisik anggaran keuangan daerah dan hasil akhir kesepakatan Musrenbang tingkat kabupaten masih dirasakan kurang lengkap dan jarang diperbarui secara berkala. Hal ini menimbulkan kesenjangan akuntabilitas di mana masyarakat hanya disajikan dokumen perencanaan tanpa adanya perimbangan informasi mengenai realisasi konkret dan evaluasi pencapaian program kerja secara berkala di lapangan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas sosial memerlukan konsistensi pengelola untuk mengunggah dokumen pertanggungjawaban keuangan secara berkelanjutan dan menggunakan format infografis yang mudah ditafsirkan oleh orang awam.

Tingkat Aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan Website Pemerintah bagi Masyarakat

Tingkat aksesibilitas dan kemudahan penggunaan website merupakan determinan utama yang menetapkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi e-government. Dilihat dari aspek arsitektur perangkat lunak, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merancang antarmuka website resmi agar bersifat mobile-friendly dan memiliki bobot pemuatan yang ringan sehingga dapat diakses secara responsif menggunakan berbagai jenis perangkat seluler pintar milik warga. Pihak pengelola teknis senantiasa memantau stabilitas server agar website bebas dari gangguan teknis internal yang dapat menghambat pencarian data publik oleh pengguna.

Fakta empiris yang diperoleh dari wawancara masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa tantangan terbesar aksesibilitas tidak bersumber dari kendala desain sistem website melainkan dipicu oleh kondisi eksternal berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum merata di wilayah pedesaan terpencil. Ketiadaan sinyal telekomunikasi yang stabil menyebabkan sebagian warga pedesaan mengalami kegagalan akses saat mencoba membuka menu layanan informasi publik digital di website resmi tersebut. Selain itu, dari aspek kemudahan penggunaan, warga yang memiliki tingkat literasi digital rendah mengungkapkan kebingungan saat menelusuri menu navigasi yang terlalu banyak teks, sehingga mereka mengharapkan adanya penyederhanaan struktur tampilan visual agar lebih ramah bagi pengguna pemula.

Pemanfaatan Website Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Publik dan Manfaat Informasi

Dampak akhir dari optimalisasi keterbukaan informasi publik secara digital adalah meningkatnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan dan penyampaian aspirasi kebijakan. Website resmi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara struktural telah menyediakan ruang interaktif berupa formulir saran elektronik dan kanal pengaduan

publik daring. Pejabat dinas memaparkan bahwa setiap aduan yang masuk akan dicatat secara otomatis lalu diteruskan kepada organisasi perangkat daerah yang berwenang untuk dicarikan solusi penyelesaian dalam jangka waktu maksimal tiga hari kerja.

Akan tetapi, kegunaan fitur interaktif tersebut secara kultural belum termanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga daerah. Mayoritas masyarakat lokal masih lebih memilih menyalurkan aspirasi, kritik sosial, dan keluhan mengenai infrastruktur publik melalui jejaring media sosial populer seperti grup Facebook dan aplikasi WhatsApp komunitas desa karena dirasa lebih familiar dan mendapatkan perhatian publik secara instan. Hal ini menunjukkan bahwa website pemerintah daerah masih menempati posisi sebagai sumber informasi sekunder dan pelengkap sarana komunikasi konvensional, belum bertransformasi menjadi ruang deliberasi digital utama. Dibutuhkan upaya edukasi publik yang konsisten agar kesadaran warga untuk memanfaatkan kanal formal digital pemerintahan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan website pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara administratif telah memberikan kontribusi positif dalam menyediakan media penyebarluasan informasi publik yang terbuka dan akuntabel, namun efektivitas sosialnya belum merata secara inklusif. Website resmi telah berfungsi baik sebagai katalog daring untuk mempublikasikan program kerja, regulasi daerah, dan pengumuman pelayanan publik kedinasan secara berkala. Kendati demikian, pencapaian target keterbukaan informasi substantif masih terhambat oleh dua faktor struktural utama, yaitu kesenjangan ketersediaan infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan terpencil serta masih bervariasinya tingkat literasi digital masyarakat pengguna, yang berakibat pada rendahnya intensitas pemanfaatan fitur interaktif dan kanal pengaduan publik formal digital.

Berdasarkan temuan kajian tersebut, disarankan beberapa langkah logis ke depan guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik digital. Pertama, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memprioritaskan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet ke wilayah pedesaan guna mengeliminasi kendala akses teknis masyarakat. Kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika harus menggalakkan program sosialisasi literasi digital secara inklusif berbasis komunitas desa untuk mengedukasi warga mengenai tata cara dan manfaat penggunaan website pemerintah resmi. Ketiga, pengelola konten website disarankan melakukan inovasi penyajian data dengan memperbanyak konten berbasis visual seperti infografis anggaran, video pendek program pembangunan, serta menyederhanakan sistem navigasi antarmuka agar lebih ramah bagi pengguna awam.

DAFTAR PUSTAKA

Argyris, C. (1964). Integrating the Individual and the Organization. New York: Wiley.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Azhari, M. R., Mustari, N., & Syukri. (2024). Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 12(1), 45-56.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. http://dx.doi.org/10.2307/249008

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Djabbari, M. H., dkk. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka. Jurnal Administrasi Modern, 8(2), 112-125.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kementerian PAN-RB & STIA LAN. (2025). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan dalam Pengelolaan Website dan Media Digital. Laporan Penelitian Institusional, Jakarta.

Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four-stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136. https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1

Maryam, H., Sjafari, A., & Riswanda. (2022). Manajemen Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cilegon. Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 3(1), 45–58. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Muninggar, R. A., & Rahardiansah, T. (2024). Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesian Standar di Masyarakat. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(3), 394-417. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.394-417

Prasetyo, D. Y. (2020). Analisis penerimaan informasi pengguna website dengan menggunakan technology acceptance model (studi kasus: dpmd.inhilkab.go.id). Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, 6(3), 178-187. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v6i3.174

Simon, H. A. (1997). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations (4th ed.). New York: Free Press.

Syafiie, I. K. (2003). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186–204. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926

Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.